

**DETERMINAN KEBERHASILAN UMK DALAM PELELANGAN
BARANG DAN JASA DI PROVINSI RIAU SEBELUM DAN SESUDAH
PERPRES 12 TAHUN 2021**

TESIS

WIDE ENARDI

NIM 2120519012



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS**

2024

**DETERMINAN KEBERHASILAN UMK DALAM PELELANGAN
BARANG DAN JASA DI PROVINSI RIAU SEBELUM DAN SESUDAH
PERPRES 12 TAHUN 2021**

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS**

2023

DETERMINAN KEBERHASILAN UMK DALAM PELELANGAN BARANG DAN JASA DI PROVINSI RIAU SEBELUM DAN SESUDAH PERPRES 12 TAHUN 2021

Oleh: Wide Enardi (2120519012)

Dibawah Bimbingan:

Dr. Sri Maryati, SE., M.Si

Dr. Neng Kamarni, SE, M.Si

Abstrak

UMK memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Perubahan kebijakan pengadaan barang dan jasa, khususnya dengan diberlakukannya Perpres No. 12 Tahun 2021 merupakan respon dan upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi dan keberhasilan UMK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara berbagai faktor dan keberhasilan UMK dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah sebelum dan sesudah diberlakukannya Perpres No. 12 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik untuk mengeksplorasi hubungan antara berbagai faktor dan keberhasilan UMK. Selain itu, penelitian juga menggunakan metode kualitatif untuk tujuan *confirmatory*, guna mendalami hasil yang diperoleh dari analisis kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan, pengalaman, ukuran tenaga kerja, dan modal berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan UMK dalam pengadaan pemerintah. Penerapan Perpres No. 12 Tahun 2021 membawa perubahan signifikan setelah penerapan kebijakan dalam korelasi antara variabel independen dan keberhasilan UMK. Perubahan terjadi pada tingkat pendidikan pemilik dan jumlah pekerja, sedangkan pengalaman usaha dan modal usaha tetap menjadi faktor yang signifikan. Hasil identifikasi terhadap aspek-aspek yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat partisipasi dan keberhasilan UMK dalam pengadaan pemerintah memberikan rekomendasi dengan menekankan adaptasi kebijakan, pengawasan regulasi, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Kajian ini memberikan wawasan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan kebijakan pengadaan untuk mendukung UMK, serta menggarisbawahi pentingnya adaptasi dan peningkatan kapasitas UMK untuk berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Kebijakan Pengadaan, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) .

DETERMINANTS OF MSEs SUCCESS IN PUBLIC PROCUREMENT AT RIAU PROVINCE BEFORE AND AFTER PERATURAN PRESIDEN NO. 12 OF 2021

By: Wide Enardi (2120519012)

Supervised by:

(Dr. Sri Maryati, SE., M.Si)

(Dr. Neng Kamarni, SE, M.Si)

Abstract

Micro and small Enterprises (MSEs) play a pivotal role in economic growth, particularly in government procurement. The policy changes in procurement, particularly the enactment of Presidential Regulation No. 12 of 2021, reflect the government's response and effort to promote MSEs participation and success. This study aims to understand the relationship between various factors and MSEs success in government procurement before and after the enactment of Presidential Regulation No. 12 of 2021. Logistic regression analysis is employed to explore the relationship between these factors and MSEs success, supplemented with qualitative deepening for confirmatory purposes to delve into the results obtained from quantitative analysis. The research findings indicate that education, experience, workforce size, and capital significantly influence MSEs success in government procurement. The implementation of Presidential Regulation No. 12 of 2021 brings about significant changes in the correlation between independent variables and MSEs success. Changes occur in the owner's education level and workforce size, while business experience and capital remain significant factors. This study also identifies aspects that need improvement to strengthen MSEs participation and success in government procurement, providing recommendations that emphasize policy adaptation, regulatory oversight, and collaboration with stakeholders. This study offers insights for the government and stakeholders to optimize procurement policies to support MSEs, highlighting the importance of adaptation and capacity building for MSEs to contribute to national economic recovery.

Keywords: Procurement Policy, Micro and Small Enterprises (MSEs)